TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus No. 1381/Pid.B/2017/PN.Mdn)

Sampurna Harahap¹

Abstract: The legal process for the criminal act of motor vehicle theft in the case of decision Number: 1381/Pid.B/2017/PNMdn, the Panel of Judges decided that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed a crime that he was charged with violating the Single Indictment, namely violating Article 362 of the Criminal Code. Efforts to overcome the crime of motor vehicle theft, namely firstly, penal efforts are efforts to prevent crimes that are repressive in nature, namely efforts to be carried out after the crime has occurred, secondly, non-penal efforts are efforts to prevent crime in the nature of prevention efforts against possible crimes committed before the occurrence of a crime.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitanya dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karna krisis ekonomi. Adapun beberapa faktor yang sering terjadi menjadi kendala masyarakat umum atas penyebabnya terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya:

¹ Mahasis Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM : 175114046

² Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hal. 20-21

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa keperibadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan sehingga menjerumuskan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum.

b. Faktor Ekonomi

Karena ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

c. Faktor Pergaulan

Pada dasarnya suatu pergaulan tertentu membuat pengaruh bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangat berbeda dan jauh dari ruang lingkup pergaulannya, di samping dengan adanya ajakan dari temanteman untuk melakukan pencurian barang barang milik orang lain.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan

Dalam hal pencurian sepeda motor ini yang biasa disebut dengan curanmor, dewasa ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat, terutama ditempat-tempat yang menjadi kost ataupun kontrakan dari para mahasiswa, dalam unsur pencurian, dalam hal ini sepeda motor merupakan objek tindak pidana pencurian, yang merupakan benda bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi tertentu dan harga tertentu.¹

Salah satu kasus tindakan pidana pencurian bermotor adalah putusan pengadilan Negeri Medan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn. Menyatakan terdakwa NANDA KUMAR Alias RAJA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP. Terdakwah telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 3427 AEF di Karaoke Naff Jalan Raden SalehKelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat

¹ Ningsih Indah Setiya, "Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor", diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>, diakses pada tanggal 03 Januari 2020

Kodya Medan milik saksi Santi Ardika dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 1381/Pid.B/2017/PN.Mdn.?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Pidana Penadahan?

Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dan Penadahan Dalam Hukum Pidana

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana aabila suami isteri tersebut masih dalam iktan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.¹ Disamping pembagian bentuk-bentuk tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini juga akan memaparkan tentang bentuk-bentuk tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan

¹ Tongat, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, 2003, hal.43.

ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain.

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
- b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu :

1) Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan :

Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- a. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHPidana ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak

dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa.¹

2) Penadahan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan :

Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor1381/Pid.B/2017/PN.Mdn

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Kejahatan penadahan juga merupakan rentetan kejahatan sebelumnya. Seperti diketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.

1. Kasus Posisi

Terdakwa NANDA KUMAR alias RAJA pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 01.40 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Karaoke Naff Jalan Raden Saleh Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kodya Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 3427 AEF milik saksi SANTI ARDIKA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu saksi SANTI ARDIKA datang bekerja sebagai karyawan di Karaoke Naff dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 3427 AEF miliknya

¹ Ibid, hal.106.

di parkir di depan Karaoke Naff. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dengan menggunakan becak bermotor menuju ke Karaoke Naff Jalan Raden Saleh Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kodya Medan dan terlihat banyak sepeda motor yang masih terparkir dan terdakwa berniat mengambil salah satunya lalu menyimpan

becak bermotor milik terdakwa di depan sekolah Budaya kemudian dengan berjalan kaki menuju ke parkir Karaoke Naff dan masuk ke dalam ruangan depan dimana suasana terlihat sepi tidak ada orang dan terdakwa melihat ada tas tergantung di dekat pintu lalu terdakwa memeriksanya dan menemukan kunci serta STNK lalu bergegas ke halaman parkir dan menaiki sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 3427 AEF serta mencoba memasukkan kunci kontak ke lobang kunci sepeda motor dan menghidupkannya ternyata berhasil, lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor dan membawanya ke Jalan Teratai Medan Maimun menjumpai temannya bernama USUP untuk digadaikan yang akhirnya laku dengan harga Rp.3.000.000,- dan memberikan bagian USUP Rp.250.000,-. Bahwa tanpa disadari terdakwa perbuatannya terlihat di CCTV Karaoke Naff yang disaksikan oleh saksi SANTI ARDIKA yang ketika itu hendak pulang bersama dengan Andi dan HERI yang juga karyawan di Karaoke Naff dan atas perbuatan terdakwa saksi SANTI ARDIKA melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada 11 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib di jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan, dimana atas perbuatan terdakwa saksi SANTI ARDIKA menderita kerugian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban

atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan seorang terdakwa bernama Nanda Kumar Alias Raja yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : “telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa berserta petunjuk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pada hari Rabu saksi SANTI ARDIKA datang bekerja sebagai karyawan di Karaoke Naff dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK. 3427 AEF miliknya di parkiran depan Karaoke Naff. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dengan menggunakan becak bermotor menuju ke Karaoke Naff Jalan Raden Saleh Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kodya Medan dan terlihat banyak sepeda motor yang masih terparkir dan terdakwa berniat mengambil salah satunya lalu menyimpan becak bermotor milik terdakwa di depan sekolah Budaya kemudian dengan berjalan kaki menuju ke parkiran Karaoke Naff dan masuk kedalam ruangan depan dimana suasana terlihat sepi tidak ada orang dan terdakwa melihat ada tas tergantung didekat pintu lalu terdakwa memeriksainya dan menemukan kunci serta STNK lalu bergegas ke halaman parkir dan menaiki sepeda motor Honda

Vario warna Hitam BK. 3427 AEF serta mencoba memasukkan kunci kontak ke lobang kunci sepeda motor dan menghidupkannya ternyata berhasil, lalu terdakwa mengemudikan sepedamotor dan membawanya ke Jalan Teratai Medan Maimun menjumpai temannya bernama USUP untuk digadaikan yang akhirnya laku dengan harga Rp.3.000.000,- dan memberikan bagian USUP Rp.250.000,-. Bahwa tanpa disadari terdakwa perbuatannya terlihat di CCTV Karaoke Naff yang disaksikan oleh saksi SANTI ARDIKA yang ketika itu hendak pulang bersama dengan Andi dan HERI yang juga karyawan di Karaoke Naff dan atas perbuatan terdakwa saksi SANTI ARDIKA melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada 11 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib di jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan, dimana atas perbuatan terdakwa saksi SANTI ARDIKA mnederita kerugian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana; selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Pada perkara ini pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang Meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dianggap saling *balance* atau proporsional bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Lebih lanjut menurut bapak Benyamin Tarigan, SH., MH seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan.

1. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Pidana Penadahan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* yang artinya adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku ini sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat

menimbulkan ketegangan individu maupun sosial. Hal itu disebabkan terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Kejahatan pidana penadahan erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Penadahan dapat mempermudah orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Agar mengurangi berbagai masalah kejahatan, maka dilakukannya upaya penanggulangan terkhusus mengenai kejahatan tindak pidana penadahan.

¹ Barda Nawawi Arief, Op.cit, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), hal. 2.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penadahan masuk kedalam tindak pidana pemudahan (begunstigings delicten) yang diatur dalam Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482 Bab XXX KUHP. Pada Pasal 480 KUHP dibahas mengenai tindak pidana penadahan biasa yang memiliki unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif pada setiap ayatnya. Pasal 481 KUHP mengenai tindak pidana penadahan berat atau kebiasaan yang unturnya juga sama yakni unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif pada setiap ayatnya. Terakhir Pasal 482 KUHP mengenai tindak pidana penadahan ringan memiliki 3 unsur,yaitu diperoleh dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), diperoleh dari penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan diperoleh dari penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).Dalam Konsep KUHP 2017, pengaturan pendahan terdapat dalam Bab XXXVI Bagian Kedua Pasal 768, Pasal 769, dan Pasal 770.
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 1381/Pid.B/2017/PN.Mdn bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbanganpertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.
3. Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan penegakan 102 hukum (*law enforcement policy*) dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Ada 2 (dua) upaya penanggulangan tindak pidana penadahan, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Kebijakan pidana dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Sarana non penal bersifat hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sarana penal bersifat represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwenang atau berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi ataupun sudah terjadi dapat dihentikan, sedangkan sarana non penal bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar segera merealisasikan Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana.
2. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati atau teliti jika ingin memperoleh ataupun mendapatkan sesuatu barang untuk mengecek apakah barang tersebut hasil tindak kejahatan atau tidak.
3. Kepada pemerintah agar lebih aktif untuk mensosialisasikan aturan mengenai tindak pidana penadahan dikarenakan masyarakat sering berdalih tidak mengetahui bagaimana meneliti barang yang hendak diperoleh.

Pustaka Acuan

- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press, , hal.43.
- Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang
- Ningsih Indah Setiya, "Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor", diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>, diakses pada tanggal 03 Januari 2020